

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II



Jl. Trans Atadei,
Lewoleba,
Kab. Lembata - NTT



(0383) 2343010



pn_lbt@yahoo.co.id



pn-lembata.go.id

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* maka diminta kepada satuan kerja untuk membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024. Laporan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2024. Dengan segala keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang ada, kami tetap bertekad untuk menjalankan amanah negara yang dipercayakan kepada kami, dengan terus berupaya menjaga kemandirian, kredibilitas dan transparansi peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi membantu terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di negara tercinta ini.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk peningkatan kinerja aparat Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Lewoleba, 17 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA



PERELA DE ESPERANZA, S.H.
NIP. 198011302003121001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	4
BAB II. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA	6
A. KEADAAN PERKARA	6
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	9
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	10
B. PENYELESAIAN PERKARA	10
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	11
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	11
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ..	11
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi....	11
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	11
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	11
1. Posbakum	11
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	12
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	12
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	13
1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/Pendidikan	13
2. Mutasi	15
3. Pangkat	15
4. Promosi	16
5. Pensiun	16

	6. Diklat	17
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	19
	A. Pengelolaan Keuangan	19
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	23
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	27
	-Implementasi <i>e-court</i>	29
	-Implementasi SIPP	30
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	31
	1. Pembangunan Zona Integritas	31
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	31
	3. Inovasi Pelayanan Publik	32
BAB VI	PENGAWASAN	34
	A. Internal	34
	B. Evaluasi	35
BAB VII	PENUTUP	36
	A. Kesimpulan	36
	B. Rekomendasi	36

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini merupakan syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang menunjukkan kemandirian lembaga dalam menyelenggarakan peradilan yaitu **Kemandirian Badan Peradilan Sebagai Sebuah Lembaga (Kemandirian Institusional) Serta Kemandirian Hakim Dalam Menjalankan Fungsinya Sesuai Undang-Undang** (kemandirian individual/fungsional), menjadi kata kunci dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan undang-undang, Badan Peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial sebagai konsekuensi dari penyatuan satu atap, maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya, dan harus didukung dengan aplikasi pengelolaan anggaran secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional/berimbang dalam APBN.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dan merupakan ujung tombak Mahkamah Agung, telah menjalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam penyelesaian perkara-perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II agar tercapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan/murah, sebagai bentuk pelayanan kepada pencari keadilan dalam setiap proses peradilan yang dihadapinya, demi menumbuhkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Lembata Kelas II. Hal ini telah tertuang dalam Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) Program Utama yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung yaitu meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi teknis dan non teknis;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu terlaksananya pembangunan, pengadaan, dan peningkatan sarana dan prasarana;
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umumnya itu penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

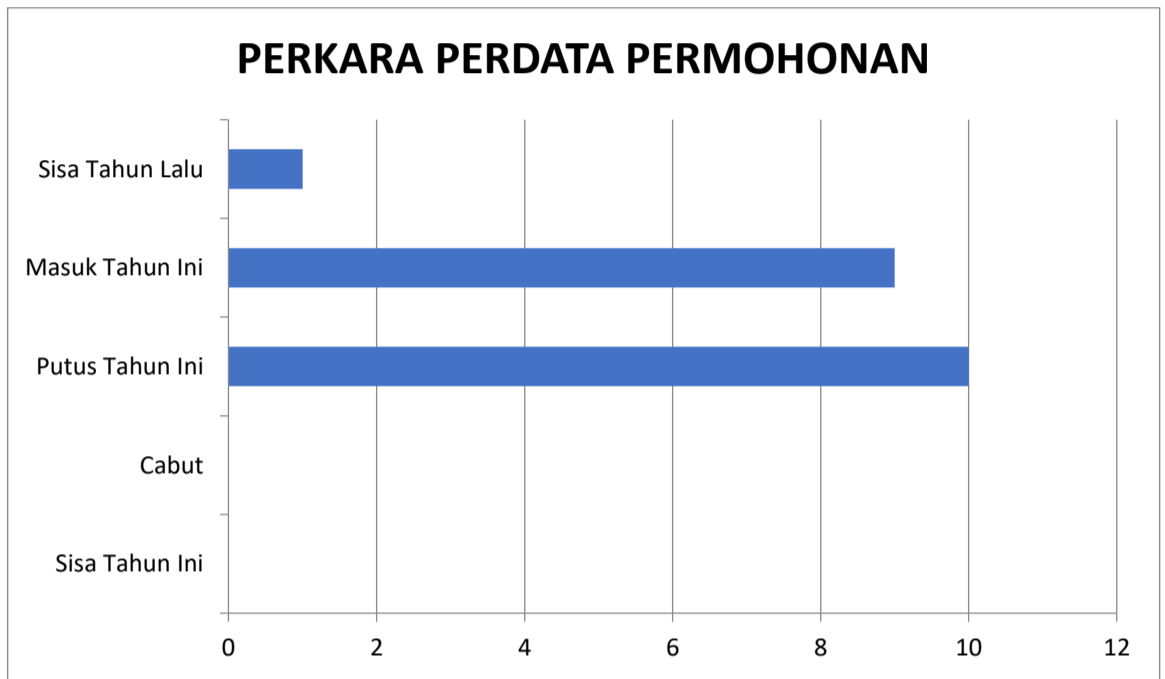
Dimana pencapaian dari ketiga program tersebut dalam Tahun Anggaran 2024 telah memberikan hasil yang memuaskan dan merupakan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi pada Tahun Anggaran 2024.

BAB II
KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA

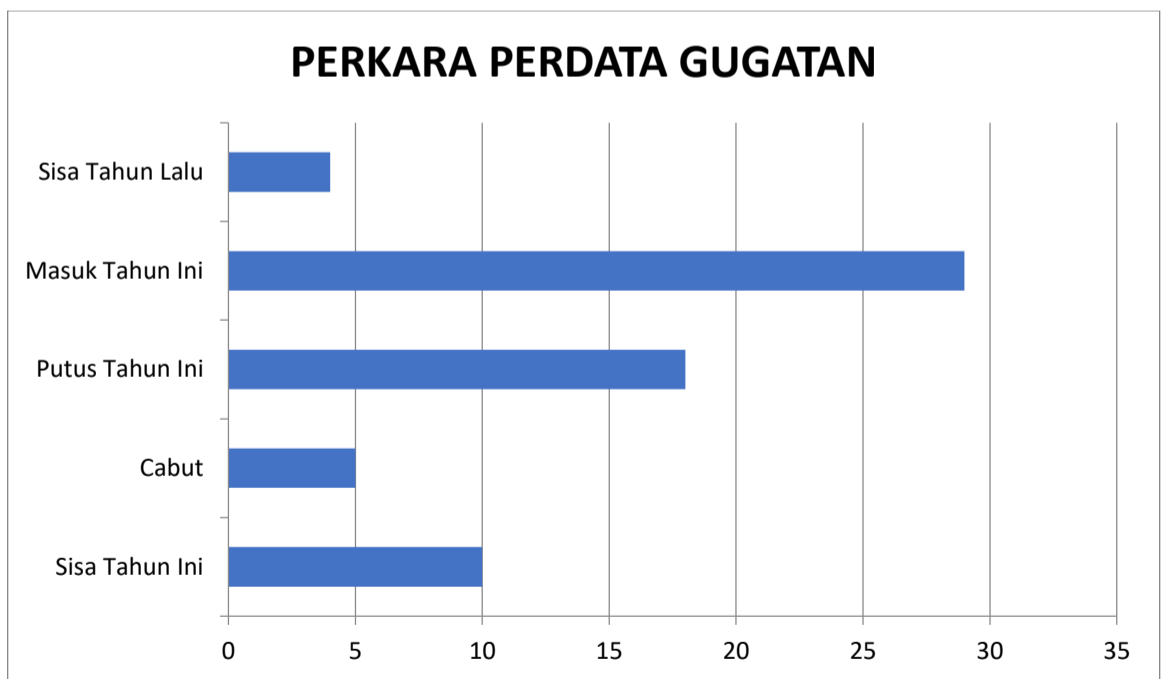
A. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Grafik Keadaan Perkara Tahun 2024

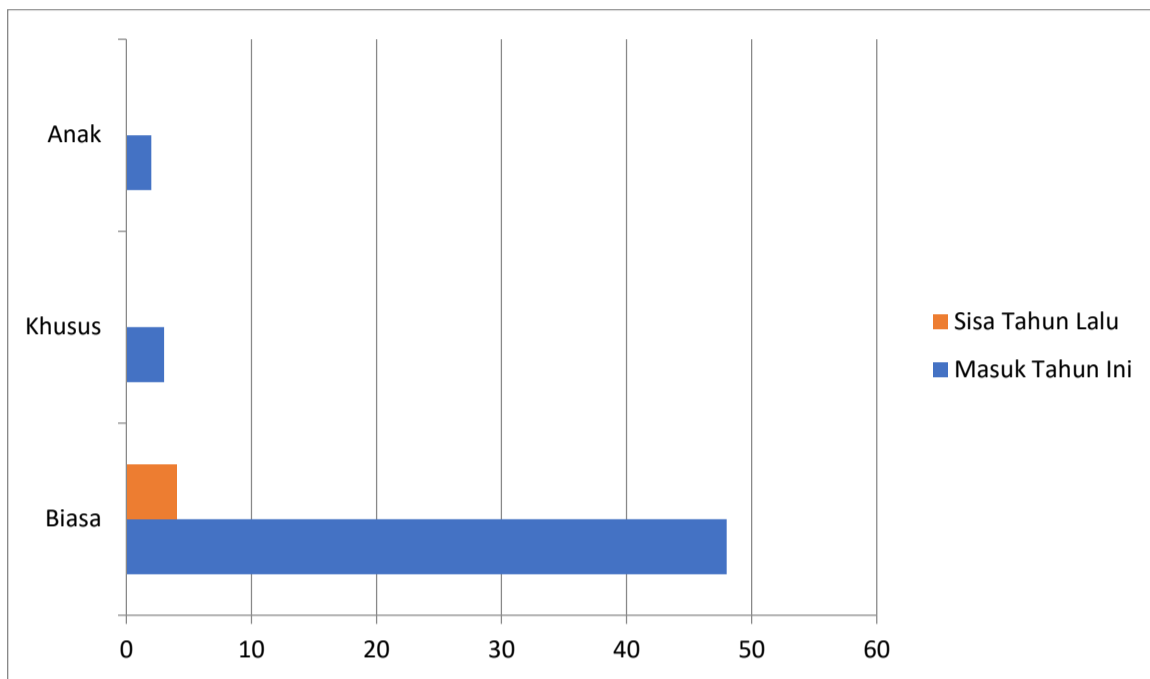


Ket. :
Sisa Tahun 2023 : 1 Perkara
Masuk Tahun 2024 : 9 Perkara
Putus Tahun 2024 : 10 Perkara
Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara



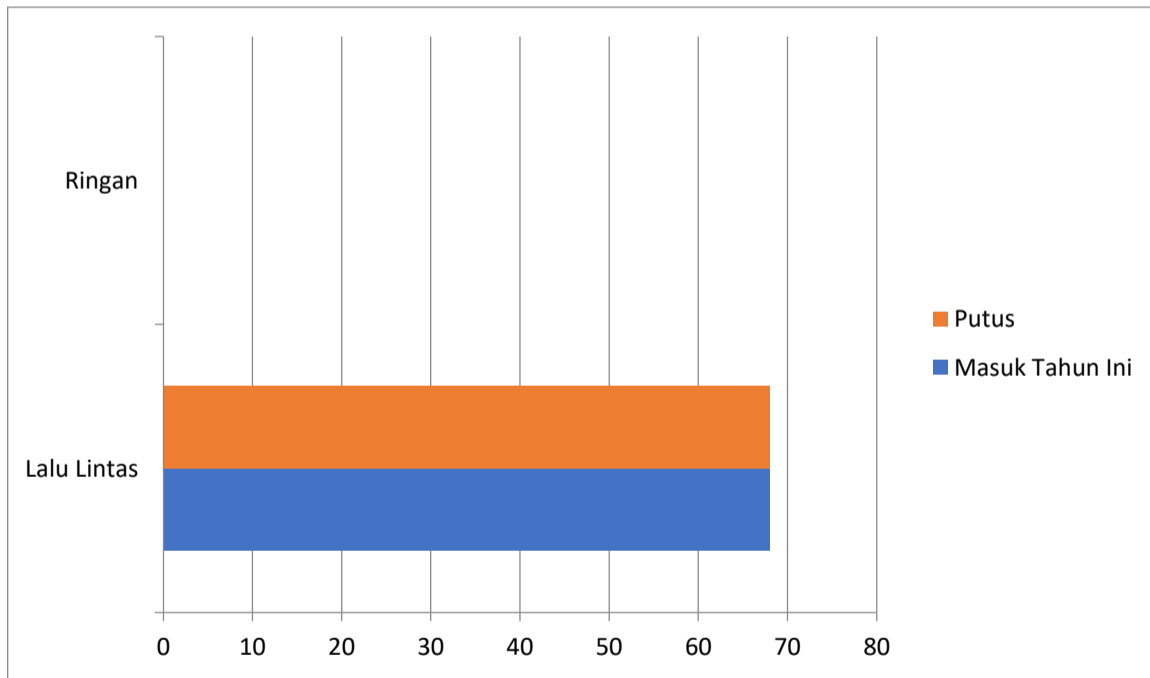
Ket. :
 Sisa Tahun 2023 : 4 Perkara
 Masuk Tahun 2024 : 29 Perkara
 Putus Tahun 2024 : 18 Perkara
 Cabut Tahun 2024 : 5 Perkara
 Sisa Tahun 2024 : 10 Perkara

PERKARA PIDANA



Ket. :
 Sisa Tahun 2023 : 4 Perkara
 Masuk Tahun 2024 : 52 Perkara (Pidana Anak : 2 Perkara, Pidana Khusus : 3 Perkara)
 Putus Tahun 2024 : 49 Perkara
 Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2024 : 8 Perkara

PIDANA LALU LINTAS

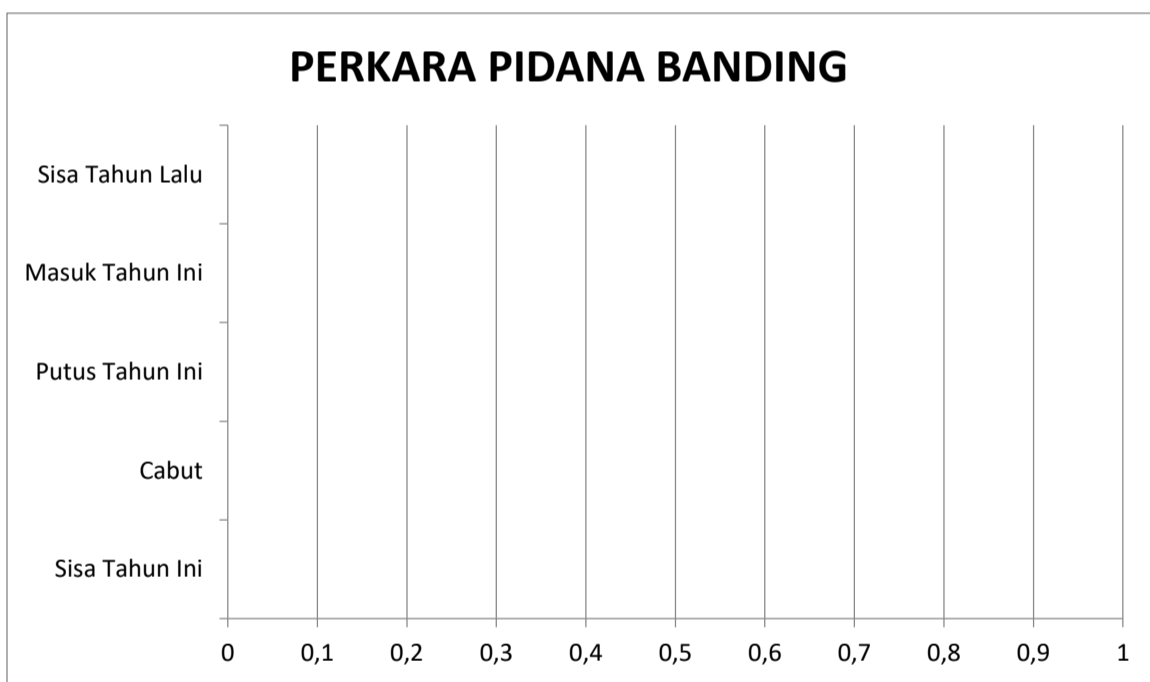


Ket. :
 Sisa Tahun 2023 : 0 Perkara
 Masuk Tahun 2024 : 68 Perkara
 Putus Tahun 2024 : 68 Perkara
 Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding



Ket. :
Sisa Tahun 2023 : 0 Perkara
Masuk Tahun 2024 : 0 Perkara
Putus Tahun 2024 : 0 Perkara
Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara

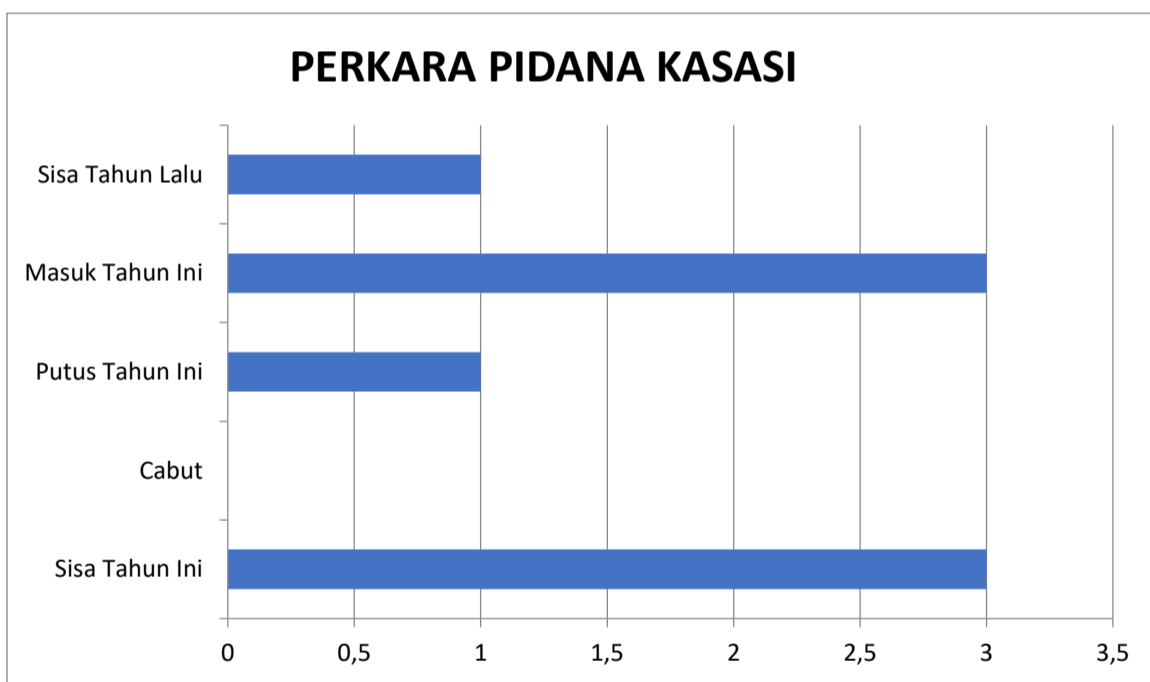


Ket. :
Sisa Tahun 2023 : 0 Perkara
Masuk Tahun 2024 : 0 Perkara
Putus Tahun 2024 : 0 Perkara
Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

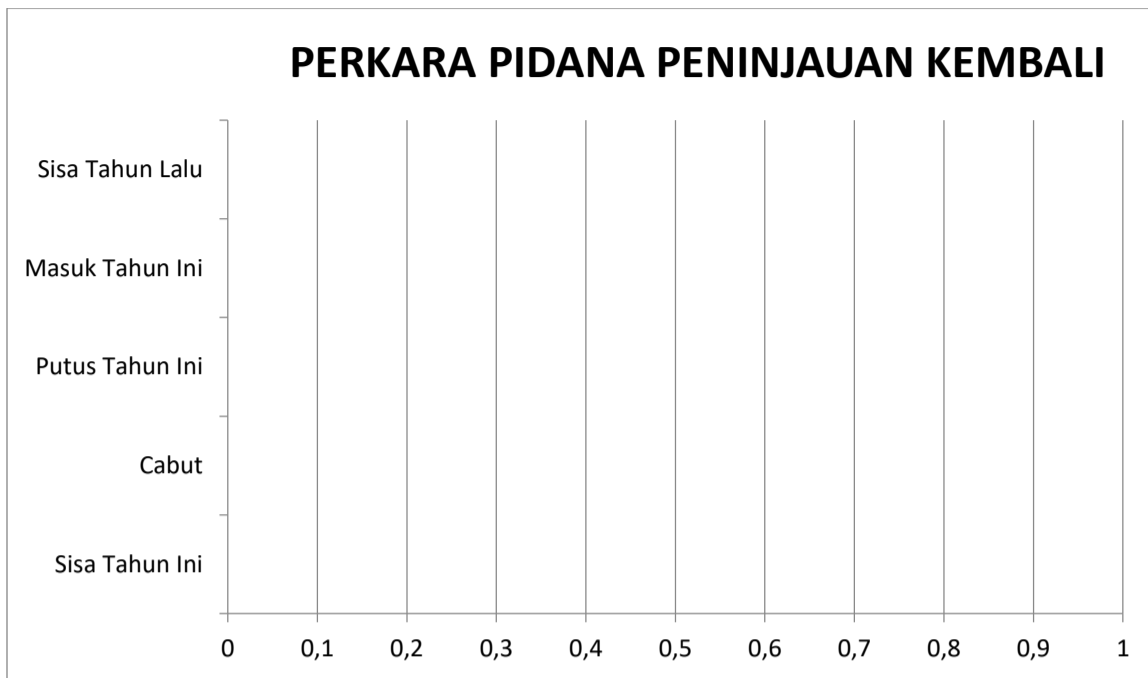


Ket. :
 Sisa Tahun 2023 : 0 Perkara
 Masuk Tahun 2024 : 0 Perkara
 Putus Tahun 2024 : 0 Perkara
 Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara

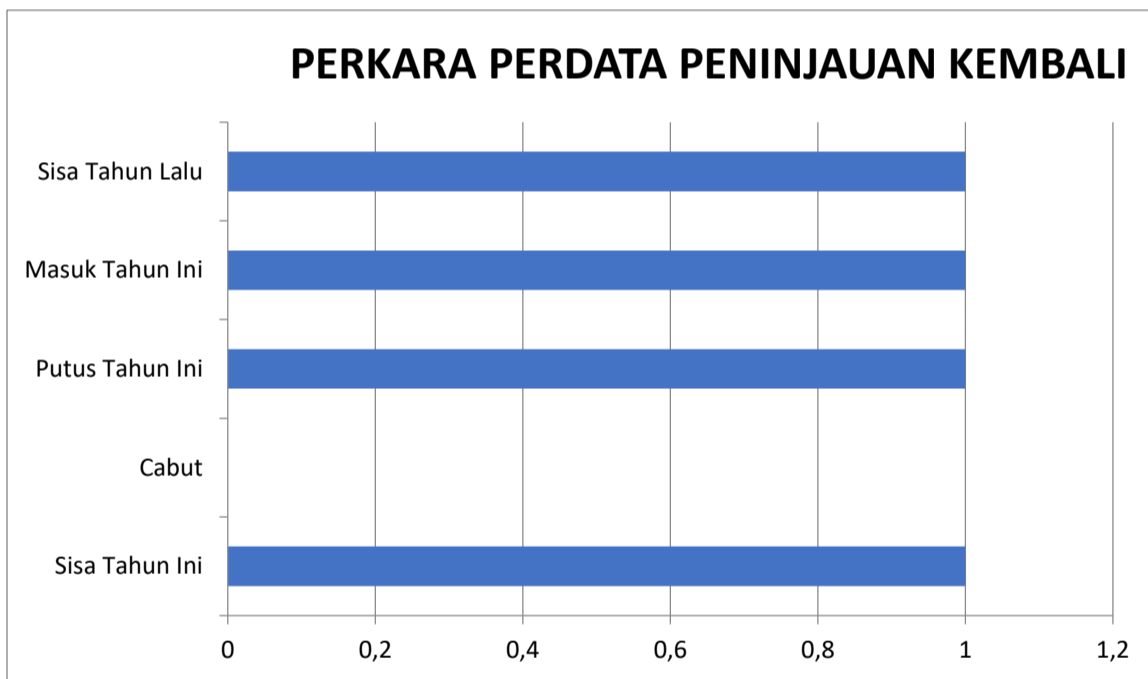


Ket. :
 Sisa Tahun 2023 : 1 Perkara
 Masuk Tahun 2024 : 3 Perkara
 Putus Tahun 2024 : 1 Perkara
 Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2024 : 3 Perkara

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali



Ket. :
 Sisa Tahun 2023 : 0 Perkara
 Masuk Tahun 2024 : 0 Perkara
 Putus Tahun 2024 : 0 Perkara
 Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara



Ket. :
 Sisa Tahun 2023 : 1 Perkara
 Masuk Tahun 2024 : 1 Perkara
 Putus Tahun 2024 : 1 Perkara
 Cabut Tahun 2024 : 0 Perkara
 Sisa Tahun 2024 : 1 Perkara

B. PENYELESAIAN PERKARA

Penyelesaian perkara Perdata dan Pidana tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai berikut :

Rekapitulasi Perkara

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Cabut/Gugur	Sisa Perkara	*Ket
PERDATA							
1.	Permohonan	1	9	10	-	-	-
2.	Gugatan	4	29	18	5	10	-
PIDANA							
1.	Pidana Biasa	4	48	44	-	8	-
2.	Pidana Khusus	-	-	-	-	-	-
3.	Pidana Anak	-	2	2	-	-	-
4.	Pidana Lalu Lintas	-	68	68	-	-	-
5.	Pidana Ringan	-	3	3	-	-	-

1) Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2023 yang diputus atau diselesaikan pada tahun 2024, sebagai berikut :

- a) Perdata : 5 (lima) Perkara
- b) Pidana : 4 (lima) Perkara

2) Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

- a) Perdata : 16 (enam belas) Perkara
- b) Pidana : 111 (seratus sebelas) Perkara

3) Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

- a) Perdata : 25 (dua puluh lima) Perkara
- b) Pidana : 111 (seratus sebelas) Perkara

4) Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Perkara Perdata yang dinyatakan berhasil melalui upaya Mediasi sebanyak 7 (tujuh) Perkara.

5) Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Tidak ada perkara Pidana Anak yang dinyatakan berhasil melalui upaya Diversi pada tingkat Pengadilan Negeri.

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh

dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan secara cuma-cuma layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan pendampingan hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan bagi masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Posbakum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah diseleksi sesuai dengan ketentuan yaitu berdasarkan tahapan-tahapan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum.

Penyelenggaraan Posbakum pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yakni melakukan kerjasama dengan LBH SURYA NTT selama tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini terdapat dalam DIPA sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Realisasi anggaran belanja hingga 31 Desember 2024 adalah Rp. 28.000.000,- atau mencapai 100%. Sisa anggaran untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp. 0,-.

Posbakum di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah dilengkapi dengan sarana prasarana seperti meubelair dan kipas angin serta akan dilengkapi dengan komputer dan printer.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Tidak ada kegiatan sidang keliling pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

3. Perkara Prodeo

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai oleh negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat tidak mampu secara ekonomis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dalam persidangan perkara pidana, bagi terdakwa yang diancam dengan pidana lebih dari 5 (lima) tahun, Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim juga telah menyediakan advokat/pengacara secara prodeo untuk mendampingi terdakwa di persidangan, bekerja sama dengan Posbakum yang telah ada di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Pada DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tidak dianggarkan belanja untuk kegiatan ini.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kondisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja peradilan yang berkualitas, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah memiliki Sumber Daya Manusia yang terdiri atas tenaga Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial, yang berdasarkan keadaan per tanggal 31 Desember 2024 yakni sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan/Pendi dikan	*Keterangan
1	Perela De Esperanza, S.H.	Ketua	Pembina Tk. I (IV/b) / S1	
2	Nur Fitri Arisandi, S.Pd	Operator - Penata Layanan Operasional	Penata Tk. I (III/d) / S1	
3	Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.	Panitera	Penata Tk. I (III/d) / S1	
4	Semuel Ihgnasius Rilli, S.H	Panitera Muda Pidana	Penata Tk. I (III/d) / S1	
5	Hermanus Suban Huller, S.H.	Panitera Muda Perdata	Penata Tk. I (III/d) / S1	
6	Jackson Deni Faah, S.AP, S.H.	Sekretaris	Penata (III/c) / S1	
7	Nani Kurnia Adriyani Adu, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata (III/c) / S1	
8	Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata (III/c) / S1	
9	Damianus Luda Ruma, S.H.	Jurusita	Penata (III/c) / S1	
10	Metty Susanty Susak, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penata (III/c) / S1	
11	Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b) / S2	
12	Irza Winasis, S.H	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b) / S1	
13	Tarek Candra Darusman, S.H	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b) / S1	
14	Erniwati Penaten Ola, A.Md	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk. I (III/b) / D3	
15	Viktor J. Y. Kota Kally, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I (III/b) / S1	
16	Yakobus Lage	Jurusita	Penata Muda (III/a) / SLTA	
17	Doan Fardaril Nepa, S.H	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a) / S1	

Dari kondisi SDM yang ada saat ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan personil baik teknis dan non teknis yudisial pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada akhir tahun 2024.

Selain itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada bagian-bagian

yang jabatan struktural teknis maupun non teknis belum terisi, maka ditempatkan staf/pegawai sebagai pelaksana. Bahkan ada bagian/urusan yang tidak memiliki staf/pegawai yaitu pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan oleh karena jumlah SDM yang tidak memadai.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dari alur Tupoksi yang ada dibandingkan dengan SDM yang ada saat ini belum cukup memenuhi syarat dari sisi kuantitasnya bagi Pengadilan Negeri Kelas II, namun mampu melakukan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi ditentukan oleh beberapa hal antara lain : kejelasan proses kerja dan standar prosedur operasional (*SOP = Standard Operasional Procedure*) untuk setiap proses kerja, kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi serta kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka langkah yang diambil sebagai pimpinan adalah dengan merekrut dan memberdayakan 12 (dua belas) orang Tenaga PPNPN yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, terdiri dari 8 (delapan) orang Pramubakti, 2 (dua) orang Supir dan 2 (dua) orang Satpam untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas administrasi, sehingga proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan dan pelaksanaan administrasi pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dapat teratasi.

Terlepas dari tugas-tugas mereka sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, ke 12 (dua belas) orang Tenaga PPNPN tersebut adalah :

- a. **MARIA THERESIA KENEKA**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Pidana;
- b. **RIKARDUS EMI LANGODAY**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- c. **ALWAN BATA**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan;
- d. **PAULUS M. BURIN**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Hukum;
- e. **GREGORIUS GUA**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- f. **THERESIA BOLA**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan;
- h. **YA YANTI MARIA IKENG, S.Si**, selain sebagai pramubakti diperbantukan

- sebagai tenaga administrasi dibagian Perdata;
- i. **LAGADONI MARTINUS LEREK**, selain sebagai supir juga diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan;
 - j. **ADRIANUS KARANG**, selain sebagai satpam diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan;
 - k. **ANTONIUS FAJARILIUS BAHU**, selain sebagai satpam diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan.
 - l. **SASWANDI SANGAJI SARABITI S.Ak**, selain sebagai pramubakti diperbantukan sebagai tenaga administrasi di bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - m. **MOHAMMAD IDRUS RIZKY, S.Ak**, selain sebagai supir juga diperbantukan sebagai tenaga administrasi dibagian Umum dan Keuangan;

2. Mutasi

Promosi dan mutasi bertujuan untuk melakukan pembinaan profesi dan karier bagi Hakim dan Pejabat Struktural PNS (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002) serta tenaga teknis peradilan, Pengaturan dan penempatan jenjang pangkat jabatan struktural (eselonisasi) maupun promosi dan mutasi Hakim dan pejabat struktural / pegawai dari satu pengadilan ke pengadilan lain yang lebih tinggi kelasnya, termasuk mutasi pangkat yang merupakan harapan utama yang diperoleh semua Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002).

Dalam Tahun 2024 terdapat 1 (satu) orang pegawai yang dimutasi keluar yaitu **Markus Reinardus Ariwibowo, S.H.**, dari jabatan Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II menjadi Panitera Pengadilan Negeri Ruteng Kelas II dan terdapat 1 (satu) orang pegawai yang dimutasi masuk pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yaitu **Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.**, dari jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B menjadi Panitera Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

3. Pangkat

Bahwa untuk diketahui bahwa pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Periode 01 April 2024 telah terjadi kenaikan pangkat sebanyak 1 (satu) orang Pegawai yang naik pangkat sedangkan untuk Periode 01 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) orang Pegawai yang naik pangkat yaitu dengan rincian

sebagai berikut :

NO	Nama / NIP	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Keterangan
1	Perela De Esperanza, S.H.	Pembina (IV/a)	Pembina Tk. I (IV/b)	TMT : 01 April 2024
2	Yakobus Lage	Pengatur Tk. I (II/d)	Penata Muda (III/a)	TMT : 01 Agustus 2024
3	Doand Fardaril Nepa, S.H.	Pengatur (II/c)	Penata Muda (III/a)	TMT : 01 Agustus 2024

4. Promosi

Promosi merupakan hal wajar dalam rangka peningkatan karier namun hendaklah mempertimbangkan kondisi SDM yang ada dan segera ditindaklanjuti dengan mengisi kekosongan yang ada sehingga hal ini bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan SDM di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang pegawai di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang mendapat promosi pada jabatan yaitu I Made Adhi Yudisatria, S.H., dari jabatan Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Lembata menjadi Calon Hakim Pratama Muda Pengadilan Negeri Tulung Agung dan Doand Fardaril Nepa, S.H. dari Pengelola Penangan Perkara menjadi Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Negeri Lembata.

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II masih terdapat jabatan-jabatan fungsional yang belum terisi akibat kekurangan tenaga personil, yang dikarenakan baik dari segi kepangkatan maupun masa kerja belum memenuhi syarat untuk dipromosikan mengisi jabatan yang masih kosong. Untuk jabatan fungsional terdapat kekosongan pada jabatan **Fungsional Bendahara, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pustakawan, dan Fungsional Arsiparis.**

5. Pensiun

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, dan pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang berhenti (mengundurkan diri) yaitu :

- a. Adrian Rainartha Nugraha, S.H., Jabatan Analis Perkara Peradilan, dan
- b. Aldhika Benyamin Madjan, S.H., Jabatan Analis Perkara Peradilan

6. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan langkah konkrit dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, bagian dalam bidang teknis maupun non-teknis. Selama tahun 2024 ada sejumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diikuti oleh para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, yaitu :

Jenis Diklat	Nama Peserta
Rapat Pendahuluan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023	1. Erniwati Penaten Ola, A.Md. 2. Doand Fardaril Nepa, A.Md. 3. Lagadoni M S Lerek
Focus Group Discussion FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	Jackson D. Faah, S.AP.,S.H.
Pendampingan dari Biro Keuangan Mengenai Pengajuan Tunjangan Kinerja Bulan Februari 2024	1. Erniwati Penaten Ola, A.Md. 2. Doand Fardaril Nepa, A.Md.
Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara Dan Lembaga (LKKL) Periode Tahun 2023 (Unaudited) serta Refreshment Cash Management	1. Erniwati Penaten Ola, A.Md. 2. Lagadoni M S Lerek
Bimbingan Teknis Satuan Kerja Pelaksanaan Rool Out Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran melalui Aplikasi SAKTI	Erniwati Penaten Ola, A.Md.
Kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan koordinasi pelaksanaan Anggaran DIPA 03 TA 2024	Jackson Deni Faah, S.AP, S.H
FGD terkait data DDA dan pembinaan mengenai statistic sektoral	Nur Fitri Arisandi, S.Pd.
Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Ujian Dinas Tk II Mahkamah Agung RI Batch 1 Tahap 1 Tahun 2024	Nur Fitri Arisandi, S.Pd.
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restorative di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024 secara online	1. Perela De Esperanza,S.H. 2. Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn. 3. Irza Winasis,S.H. 4. Tarekh Candra Darusman,S.H.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Secara Blended Learning Tahun 2024	Erniwati Penaten Ola, A.Md.
Pelatihan Online Pengelolaan BMN Batch II Tahun 2024	Erniwati Penaten Ola, A.Md.
Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2024	Erniwati Penaten Ola, A.Md.
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2024 dengan Agenda Penginputan Sewa Rumah Dinas	1. Jackson Deni Faah,S.AP.,S.H. 2. Markus Balsasar Efata Nuban,S.H. 3. Nur Fitri Arisandi, S.Pd.
Bimbingan Teknis Satuan Kerja Pelaksanaan Rool Out	1. Erniwati Penaten Ola,A.Md.

Penyampaian Dan Validasi LPJ Bendahara Penerimaan	2. Nur Fitri Arisandi,S.Pd.
Ujian Dinas Elektronik (e-exam) Batch Tahap 3 dan 4 Ujian Penyesuaian Ijasah Tahun 2024	1. Yakobus Lage 2. Doand Faradriil Nepa,A.Md.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Secara Blended Learning Tahun 2024	Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan telah diselesaikannya Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2025 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum pada Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya Agenda : 1. Evaluasi Kinerja Anggaran TA 2023 2. Overview Kinerja Anggaran Semester I TA 2024 3. Overview Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2025	1. Jackson Deni Faah, S.AP., S.H. 2. Nur Fitri Arisandi, S.Pd.
Rapat Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran TA 2025	1. Jackson Deni Faah, S.AP., S.H. 2. Nani Kurnia Adriyani Adu, S.H. 3. Nur Fitri Arisandi, S.Pd.
Pendampingan Perbaikan Data Eksekusi	1. Markus Reinardus Ariwibowo, S.H. 2. Hermanus Suban Huler, S.H. 3. Alwan Bata, S.Kom.
Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Tahun 2024	Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.
Pembinaan Teknis secara Hybrid oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia	1. Perela De Esperanza, S.H. 2. Petra Kusuma Aji, S.H.M.Kn. 3. Irza Winasis, S.H. 4. Tarekh Candra Darusman, S.H. 5. Markus Reinardus Ariwibowo, S.H. 6. Jackson Deni Faah, S.AP.S.H.
FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun 2024	Jackson Deni Faah, S.AP., S.H.
Monev Penyelesaian Perkara Elektronik	1. Perela De Esperanza, S.H. 2. Markus Reinardus Ariwibowo, S.H. 3. Samuel Ihgnasius Rili, S.H. 4. Hermanus Suban Huler, S.H. 5. Metty Susanty Susak, S.H.
Mekanisme Pengadaan PPPK di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya	1. Jackson Deni Faah, S.AP.,S.H. 2. Nani Kurnia Adriyani Adu, s.H. 3. Nur Fitri Arisandi, S.Pd. 4. PPNPN
Diklat Bendahara Penerimaan	Nur Fitri Arisandi, S.Pd.
Pembekalan Peserta bagi Panitera, Panitera Muda, PP dan JS/JSP	1. Panitera 2. Panitera Muda 3. PP 4. Dan JS
Kegiatan Pemetaan Pegawai Pelaksana di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di bawahnya	Nur Fitri Arisandi, S.Pd.
Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)"Prosedur Pelaksanaan Lelang dan Penghapusan BMN"	Jackson Deni Faah, S.AP.,S.H

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

URAIAN 1	AKUN 2	ANGGARAN 3	REALISASI 4	SISA ANGGARAN 5	KETERANGAN 6
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066.994 Layanan Perkantoran 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Realisasi 31 Desember 2024
Belanja Gaji Pokok PNS	511111	939,000,000	931,954,200	7,045,800	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	18,000	14,706	3,294	
Belanja Tunj. Suami/isteri PNS	511121	83,380,000	69,722,330	13,657,670	
Belanja Tunj. Anak PNS	511122	19,300,000	17,635,790	1,664,210	
Belanja Tunj. Struktural PNS	511123	28,400,000	28,140,000	260,000	
Belanja Tunj. Fungsional PNS	511124	706,397,000	701,080,000	5,317,000	
Belanja Tunj. PPh PNS	511125	87,000,000	83,842,161	3,157,839	
Belanja Tunj. Beras PNS	511126	54,000,000	51,418,200	2,581,800	
Belanja Uang Makan PNS	511129	147,625,000	137,030,000	10,595,000	
Belanja Tunjangan Umum PNS	511151	8,423,000	7,715,000	708,000	
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	511157	81,000,000	64,800,000	16,200,000	
Jumlah Belanja 51		2,154,543,000	2,093,352,387	61,190,613	

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
002.0A. Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran					
Belanja Keperluan Perkantoran	521111	382,541,000	375,761,580	6,779,420	Realisasi 31 Desember 2024
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	521811	47,145,000	47,127,000	18,000	
Jumlah Belanja 002.0A		429,686,000	422,888,580	6,797,420	
002.0B. Langganan Daya Dan Jasa					
Belanja Keperluan Perkantoran	521811	147,000,000	135,499,900	11,500,100	Realisasi 31 Desember 2024
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	521114	12,000,000	11,609,800	390,200	
Belanja Langganan Telepon	522112	600,000	0	600,000	
Belanja Langganan Air	522113	23,000,000	21,490,500	1,509,500	
Belanja Sewa	522141	3,000,000	2,999,220	780	
Jumlah Belanja 002.0B		185,600,000	171,599,420	14,000,580	
002.0C. Pemeliharaan Kantor					
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	523111	284,386,000	278,748,911	5,637,089	Realisasi 31 Desember 2024
Belanja Gedung dan Bangunan Lainnya	523119	49,000,000	45,354,000	3,646,000	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523121	163,372,000	161,582,751	1,789,249	
Jumlah Belanja 002.0C		496,758,000	485,685,662	11,072,338	
002.0D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor					
Belanja Keperluan Perkantoran	521111	21,700,000	21,700,000	0	Realisasi 31 Desember 2024
Belanja Honor Operasional Satuan	521115	27,948,000	27,936,000	12,000	

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Kerja					
Jumlah Belanja 002.0D		49,648,000	49,636,000	12,000	
002.0F. Koordinasi Ke Tingkat Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	524111	76,640,000	76,640,000	0	Realisasi 31 Desember 2024
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	524113	5,400,000	5,400,000	0	
Jumlah 002.0F		82,040,000	82,040,000	0	
002.0G. Konsultasi Ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL					
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	524111	88,520,000	88,373,859	146,141	Realisasi 31 Desember 2024
Jumlah 002.0G		88,520,000	88,373,859	146,141	
002. 0I. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim					
Belanja Sewa	522141	1,000	0	1,000	Realisasi 31 Desember 2024
Jumlah 002.0H		1,000	0	1,000	
JUMLAH BELANJA 52		1,332,253,000	1,300,223,521	32,029,479	
TOTAL BELANJA SATKER KESELURUHAN		3,486,796,000	3,393,575,908	93,220,092	97,33 %

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

URAIAN 1	AKUN 2	ANGGARAN 3	REALISASI 4	SISA ANGGARAN 5	KETERANGAN 6
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum					Realisasi 31 Desember 2024
1049.003 Pos Bantuan Hukum					
Belanja Jasa Konsultan	522131	28.000.000	28.000.000	0	
Jumlah Belanja 522131		28.000.000	28.000.000	0	
1049.005 Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah					Realisasi 31 Desember 2024
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	521114	410.000	0	410.000	
Jumlah Belanja 521114		410.000	0	410.000	
Belanja Bahan	521211	7.385.000	6.630.000	755.000	
Jumlah Belanja 521211		7.385.000	6.630.000	755.000	
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	521811	3.480.000	3.379.000	101.000	
Jumlah Belanja 521811		3.480.000	3.379.000	101.000	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	524113	10.725.000	10.260.000	465.000	
Jumlah Belanja 524113		10.725.000	10.260.000	465.000	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a) Pengadaan :

- Gedung Kantor :

Terletak di jalan Trans Atadei, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan luas bangunan 1.586 m² yang dibangun dengan sumber dana APBN yang dialokasikan dalam DIPA Pengadilan Negeri Larantuka pada tahun 2006 dan dalam Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II. Selain itu juga telah dibangun gedung arsip dan perpustakaan dengan luas bangunan 63 m² bertujuan untuk disediakan ruang khusus guna pengelolaan dan penataan arsip-arsip berkas perkara dari tahun ketahun serta pengelolaan dan penataan buku-buku perpustakaan, kemudian dalam Tahun Anggaran 2009 dengan DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah dibangun garasi mobil, ruang barang bukti dan garasi motor. Garasi barang bukti untuk penyimpanan barang-barang bukti dalam kecelakaan lalulintas, dalam Tahun Anggaran 2010 untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan kantor.

Pada tahun 2019 telah dibuat ruang *kaukus*, meja *Inzage* dan tempat sampah kantor, tempat parkir motor untuk pengunjung yang hingga tahun 2024 ini dalam kondisi baik.

Pada tahun 2020 telah dibuat jalur dan tangga darurat evakuasi di halaman belakang kantor, pengecatan fasilitas-fasilitas luar dan dalam kantor, penataan taman kantor, pembuatan pagar pembatas tanah kapling sebelah barat kantor, pembuatan area steril pembatas area kerja dengan area pelayanan dan pembuatan ruang rapat dan telekonferensi di lantai dua kantor.

- Rumah Dinas/Rumah Negara :

Rumah Dinas/Rumah Negara merupakan fasilitas yang disediakan untuk untuk Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk memberikan kenyamanan serta konsentrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dalam Tahun Anggaran 2006 dengan sumber dana DIPA Pengadilan Negeri Larantuka telah dibangun 7 (tujuh) unit Rumah Dinas Hakim dengan luas bangunan masing-masing 54 m² yang terletak di dalam kompleks kantor tepatnya dibelakang gedung Kantor Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, namun pada saat pembangunan tidak

dianggarkan biaya pengadaan dan pemasangan meteran rumah dinas sehingga untuk penerangan rumah dinas tersebut menggunakan listrik kantor yang pembayarannya dilakukan oleh Kantor sampai dengan bulan Juni 2011. Untuk saat ini rumah dinas/rumah negara sudah memiliki meteran listrik tersendiri yang biayanya dibebankan kepada penghuninya. Sedangkan khusus untuk rumah dinas Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris belum ada. Untuk 7 (tujuh) unit Rumah Dinas Hakim tersebut saat ini sementara ditempati oleh :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Ketua	1	√			Rehab
2.	Wakil Ketua	-	√			Rehab
3.	Hakim	3	√			Rehab
4.	Panitera	1	√			Rehab
5.	Sekretaris	1	√			Rehab

Usulan untuk pembangunan Rumah Dinas/Rumah Negara untuk Ketua dan Wakil di atas lahan yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata belum diakomodir karena memberikan prioritas kepada Pengadilan Negeri yang baru dibentuk berupa pengadaan sarana dan prasarana gedung maupun sarana dan prasarana fasilitas gedung.

- **Kendaraan Dinas**

Sejak tahun 2006 hingga tahun 2024 Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah memiliki sejumlah kendaraan dinas yang terdaftar dalam daftar SIMAK BMN guna membantu untuk kelancaran proses pelayanan operasional perkantoran, yakni :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
KENDARAAN RODA 4						
1	Toyota Inova	2006		√		
2	Toyota Avanza	2015		√		
KENDARAAN RODA 2						
1	Honda NF 100 SL	2007	√			
2	Honda NF 100 SL	2007	√			
3	Honda Supra Fit X	2008		√		
4	Honda NNF11C1C	2011	√			

5	Honda NNF11C1C	2011	√			
---	----------------	------	---	--	--	--

b) Pemeliharaan :

Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor maupun Rumah Dinas/Rumah Negara dialokasikan dalam DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, dan dengan kondisi bangunan kantor yang telah direhab antara lain Pada Tahun 2024 telah direhab plafon kantor bagian ruang tunggu pengunjung sidang pada Pengadilan Negeri Lembata dan pemeliharaan rutin lainnya.

Untuk Rumah Dinas telah diadakan kegiatan renovasi untuk 7 (tujuh) rumah dinas Hakim dan untuk kendaraan dinas telah dilakukan perawatan secara rutin sesuai dengan yang telah dianggarkan dalam DIPA.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

(a) Pengadaan :

- ✓ Dalam Tahun Anggaran 2024 tidak dialokasikan dana dalam DIPA Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung.
- ✓ Tidak ada penambahan alat pengolah data dan komunikasi pada Pengadilan Negeri Lembata.
- ✓ Secara keseluruhan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
I. RUANGAN			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	3	
7	Ruang Sekretariat	3	
8	Ruang Sidang Umum	2	Utama dan 1
9	Ruang Sidang Anak	1	
10	Ruang Server	1	
11	Ruang PTSP	1	
12	Ruang Mediasi/Diversi	1	
13	Ruang Posbakum/Penasehat Hukum	1	
14	Ruang Jaksa	1	
15	Ruang Tahanan	1	Sel Pria dan Wanita yang masing-masing terpisah

16	Ruang Tunggu Anak	1	
17	Ruang Barang Bukti	1	
18	Ruang Arsip Perdata	1	
19	Ruang Arsip Pidana	1	
20	Ruang Tamu Terbuka	1	
21	Ruang Ramah Anak	1	
22	Ruang Klinik dan Laktasi	1	
23	Ruang Perpustakaan	1	
24	Ruang <i>Kaukus</i>	1	
25	Ruang Bapas	1	
26	Ruang Pantry	1	
27	Ruang Gudang	1	
28	Ruang Mushola	1	
29	Ruang Tamu Terbuka	1	
30	Ruang Ajudan/Sespri	1	
31	Ruang Teleconference	1	
32	Ruang Dhharmayukti	1	
33	Ruang Barang Bukti	1	
II. Gedung/Bangunan			
1	Tempat Parkir/Garasi	1	
2	Pos Sekuriti / Satpam	1	
III. Fasilitas Perkantoran			
1	Server	2	
2	Rak server	1	
3	Router	1	
4	Wireless PCI Card	10	
5	Modem	-	
6	Wireless	1	
7	AC	24	
8	Komputer / PC	28	
9	Laptop	14	
10	Printer	17	
11	Scanner	2	
12	Mesin fotocopy	2	1 unit Rusak Berat
13	PBAX	1	
14	Stasionary Generating Set	2	1 unit rusak berat
15	Pompa Air	1	
16	Lemari Besi	-	
17	Lemari Kayu	69	
18	Lemari Katalog	1	
19	Rak Besi	3	
20	Rak Kayu	1	
21	Brandkas	2	
22	Meja Kerja Besi/Metal	1	
23	Meja Kerja Kayu	76	
24	Meja Komputer	6	
25	Meja Ketik	4	
26	Meja Resepsionis	1	
27	Meja Makan Besi	1	
28	Meja Makan Kayu	1	
29	Kursi Besi/Metal	64	
30	Kursi Kayu	37	
31	Kursi Fiber Glass/Plastik	14	
32	Bangku Panjang Besi/Metal	18	
33	Bangku Panjang Kayu	21	
34	Tempat Tidur Kayu	3	

35	Kasur/Sping Bed	1	
36	Dispenser	5	
37	Partisi	3	
38	Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak Berat
39	Kipas Angin	9	
40	Televisi	2	
41	Amplifier	1	
42	Loudspeaker	8	
43	Microphone Table Stand	3	
44	Stabilisator	2	
45	Tiang Bendera	7	
46	LCD Monitor	2	
47	Lambang Instansi	1	
48	Microphone/Wireless Mic	1	
49	Microphone/Boom Stand	1	
50	Microphone Cable	8	
51	Power Amplifier	1	
52	Digital Audio Storage System	1	
53	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	
54	Antene SHF Stationary	-	
55	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	1	
56	Switcher Antena Lainnya	1	
57	Reciever STL/UHF	2	
58	Fax	1	
59	Papan Visual/Papan Nama	11	
60	CCTV	1	
61	Mesin Finger Scan	1	
62	Jaringan listrik lainnya	8	
63	Monografi	9	
64	TV Monitor	1	
65	Kamera Sidang	1	

(b) Pemeliharaan :

Untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana fasilitas gedung dan Barang Milik Negara lainnya yang ada, maka setiap tahun telah dialokasikan dana dalam DIPA khusus untuk biaya pemeliharaan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas bantuan, juga untuk percepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

(c) Penghapusan :

Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, masih mendata pengusulan untuk penghapusan peralatan dan mesin yang telah rusak.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dewasa ini, dinamika pasca reformasi, kian mendorong Pemerintah agar lebih meningkatkan transparansinya (keterbukaan) dalam setiap aktivitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakatnya. Tuntutan ini juga kian mengkrystal dalam bentuk

“jaminan” atas akses informasi publik.

Pada dasarnya informasi selalu dan mampu memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sosial dan demokrasi. Jika masyarakat kita telah lebih baik dalam mengelola informasi, memberi dan mengambil manfaat dari sumber-sumber informasi terutama dalam hal-hal terpenting dari pemerintahan, layanan dan akses publik, maka besar kemungkinan mereka bisa memberikan kontribusi yang tidak kalah penting dengan ikut berperan serta dalam “mempengaruhi” lahirnya sebuah (produk) keputusan atau mungkin juga undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diganti dengan Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, maka Pengadilan berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini, bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan dengan rakyat pencari keadilan.

Mahkamah Agung RI telah mendesain sistem atau pola penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan keragaman karakteristik daerah didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada sehingga diharapkan semua Pengadilan sudah memiliki front office di dunia maya, baik yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs. Akses langsung inilah yang sedianya diharapkan sebagai “*better informed*” atas layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet). Namun demikian, layanan informasi yang demikian itu akan lebih baik jika data-data yang disajikan selalu diperbaharui. Demi mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan informasi pengadilan yang transparan, di lingkungan Pengadilan, perlu dilakukan pendayagunaan organisasi meliputi penataan struktur, fungsi, rentang kendali dan saling hubungan dalam proses pengambilan keputusan, penetapan kebijaksanaan alokasi dan realokasi sumber daya serta efisiensi birokrasi. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan performance (kinerja) pelayanan publik yang optimal.

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sejak tahun 2012 telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana IT berupa pengadaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat

lunak (*software*) dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area (internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs yaitu:

✓ **Perangkat Keras :**

- (a) 1 (satu) unit Server Fujitsu Primergy TX1330 M4 PS170 S2631K1639-V601 serial no. MAJL006527;
- (b) 1 (satu) unit Monitor Merek LG 42”;
- (c) 1 (satu) unit LAN Network;
- (d) 1 (satu) unit Wireless;
- (e) 7 (tujuh) unit UPS;
- (f) 2 (dua) unit Server (rusak berat);
- (g) 1 (satu) unit Mikrotik Router Board.

✓ **Perangkat Lunak :**

- (a) Website dengan domain name <http://pn-lembata.go.id>;
- (b) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Domain Name : <http://sipp.pn-lembata.go.id>;
- (c) Software Whatsapp Robot “ Silamalera”;
- (d) Software Siadonara;
- (e) Software Timore;
- (f) Antivirus.

Selain perangkat keras dan perangkat lunak maka Pengadilan Negeri Lembata juga mengimplementasikan aplikasi pelayanan publik yang disediakan oleh mahkamah agung melalui aplikasi lokas antara lain yaitu :

1. Implementasi e-Court

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, Mahkamah Agung menghadirkan sejumlah inovasi layanan berbasis internet, yang diharapkan dapat mempermudah pemberian layanan kepada para pencari keadilan, salah satunya yakni aplikasi *e-Court*. Aplikasi ini menjadikan sistem pendaftaran perkara pada Pengadilan dapat dilakukan secara online. Dasar hukum penerapan e-court pada badan peradilan antara lain :

- ✓ Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- ✓ Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 122/ KMA/ SK/ VII/ 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;
- ✓ Keputusan Dirjen Badilum Nomor 271/ DJU/SK/PS01/ 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sendiri telah menerapkan *e-court* dan hingga akhir tahun 2024 seluruh perkara yang terdaftar yaitu sebanyak 13 perkara gugatan biasa dan 2 Gugatan sederhana seluruhnya telah menerapkan aplikasi e-Court dan sejumlah 45% dari total perkara perdata telah menerapkan e-Litigasi, dimana yang tidak menerapkan e-Litigasi disebabkan karena pihak Tergugat tidak menggunakan jasa Penasihat Hukum dan Koneksi Internet di desa-desa di Kabupaten Lembata belum memadai.

2. Implementasi SIPP

Pada tahun 2012 informasi terkait perkara pada peradilan semakin mudah didapatkan dengan adanya *Case Tracking System (CTS)* atau yang saat ini dikenal dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Tujuan utama hadirnya SIPP adalah terciptanya tertib administrasi perkara dan terciptanya pengelolaan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan saling menunjang bagi internal aparatour peradilan serta pihak lain yang membutuhkan informasi perkara.

Pengadilan Negeri Lembata Kelas II terus memantau terkait pembaharuan versi aplikasi SIPP, dimana saat ini telah mencapai versi terbaru yaitu versi 5.6.4.

Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi MIS dan kegiatan Monev terkait kinerja SIPP dan MIS Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang dilakukan setiap bulan baik saat Pengawasan Internal maupun Pengawasan Eksternal, menunjukkan data elektronik pada aplikasi SIPP dan berkas perkara telah sesuai serta terisi dengan baik.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Negeri sebagai rumah bagi masyarakat pencari keadilan harus dapat menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas dan dipercaya oleh publik, oleh karenanya selain memberikan pelayanan sebagaimana tupoksinya, Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dituntut harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan terukur, menciptakan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Untuk mendukung dan menciptakan wilayah bebas korupsi inilah Pengadilan Negeri Lembata telah menuangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 24/KPN.W26-U13/OT1.2/I/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Nomor W26-U13/30/OT01.3/I/2023 tentang Penetapan Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Birokrasi Bersih Melayani Di Pengadilan Negeri Lembata.

Selain dari mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani, terlebih dahulu berdasarkan penilaian dari Tim Penjaminan Dirjen Badilum pada tanggal 22-24 Mei 2017, kita patut bersyukur karena Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Pengadilan dengan nilai "A" Excellent, yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Juli 2017 di Banyuwangi.

Bahwa berdasarkan penilaian terakhir dari tim KEKA Badilum tanggal 04 April 2022, Pengadilan Negeri Lembata dapat mempertahankan nilai akreditasi dengan jumlah 711 sehingga tetap mempertahankan nilai "A" Excellent.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu, dimana PTSP di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah dibuat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/II/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,

transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PTSP dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya yang dilaksanakan yaitu pelayanan e-Court dengan menggunakan meja pojok *e-Court*, dan Meja *Inzage*.

Meja PTSP Pengadilan Negeri Lembata di tahun 2024 juga dilengkapi dengan mesin K-Touchscreen, CCTV, televisi pengunjung, mesin antrian PTSP untuk masyarakat pengguna layanan PTSP serta perangkat lainnya.

Petugas PTSP juga senantiasa telah dilakukan briefing oleh petugas briefing secara rutin dan telah diadakan pelatihan oleh Customer Service BRI cabang Lewoleba.

PTSP pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II telah dibuat sesuai pedoman standar tersebut lengkap dengan susunan petugas yang dibuat sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, memiliki SOP terkait pelayanan Meja PTSP, penyediaan brosur-brosur, dan Job Description masing-masing petugas di meja PTSP.

3. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik merupakan pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarkan ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa inovasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II adalah :

- a. Penyampaian brosur-brosur elektronik secara langsung ke desa-desa terkait pelayanan Eraterang;
- b. Kios K-Touchscreen atau anjungan touchscreen yang diletakkan di area PTSP yang berisi menu informasi berupa hasil Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat, hasil survey Indeks Persepsi Korupsi, aplikasi SIWAS MARI, SIPP dan Website tentang peradilan yang dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat, serta brosur brosur elektronik yang dapat di akses di mesin Kios K-Touchscreen tersebut sehingga mempermudah masyarakat

memperoleh informasi secara mandiri apabila datang ke Kantor Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

- c. Perangkat Whatsapp “Silamalera”, diluncurkan pertengahan tahun 2023, dan brosur-brosur Whatsapp “Silamalera” telah disebarluaskan yang merupakan aplikasi berbasis whatsapp yang berfungsi memberikan informasi kepada masyarakat terkait informasi perkara, jadwal sidang berita kegiatan Pengadilan Negeri Lembata, berita kegiatan Dirjen Badilum maupun berita kegiatan Mahkamah Agung serta pelacakan proses disposisi surat masuk pada pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Lembata.
- d. Aplikasi e-Survey, diluncurkan bulan November 2020 yang memuat survey kepuasan masyarakat dan sekaligus survey indeks persepsi korupsi secara elektronik yang bisa diisi oleh pengguna pengadilan yang menggantikan survey yang menggunakan kertas biasa sehingga mempermudah pengisian dan pendataan serta pembuatan laporan hasil survey bagi tim survey PN Lembata yang mana dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam melakukan pengawasan internal langsung ditangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebagai Koordinator Pengawas Bidang dan Para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang dikarenakan dari Januari 2024 hingga awal Desember 2024 terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua.

Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan melekat yang ada pada masing-masing pejabat yang bersangkutan, telah dilakukan tatap muka secara berkala dengan semua Hakim dan Pegawai serta PPNPN untuk mengakomodir segala permasalahan yang timbul serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Oleh karenanya pengawasan juga dilihat dalam konteks pembinaan dan peningkatan kapasitas kinerja. Di samping itu juga untuk meningkatkan penggunaan parameter obyektif dengan berpedoman pada Standard Operational Procedure (SOP) buku IV tentang Tata Laksana pengawasan Pengadilan.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial dengan sasaran pengawasan kepada aparat Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dalam bentuk pengawasan langsung dengan cara pemeriksaan reguler dan pemeriksaan serta pengawasan tidak langsung dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan pemberitaan lewat media massa (apabila ada). Pengawasan bulanan oleh Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap bulan serta Audit Internal dan Audit Eksternal dari Pengadilan Tinggi Kupang yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari penjaminan mutu.

Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Kepaniteraaan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara, pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, inventaris barang dan administrasi umum, pengawasan terhadap perilaku aparat pengadilan, dan evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik serta pengawasan terhadap 5R dan K3 untuk memaksimalkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

Bahwa di tahun 2024 selain pengawasan Internal telah pula dilaksanakan oleh Pengawas Eksternal yaitu :

1. Tim Assessment dari Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengadakan pembinaan, assessment, serta pengawasan pada bulan September 2024 yang mana hasil temuan telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.
2. Pembinaan dan pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pada bulan September 2024 di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara daring melalui zoom meeting pada bulan februari 2024, bulan oktober 2024 dan bulan november 2024.

B. EVALUASI

Hasil assessment dan pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis oleh untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, dan telah dievaluasi dalam rapat bulanan untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas bidang dengan melakukan penyesuaian/perbaikan dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi benar-benar sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*.

Bahwa selain pengawasan reguler dari Hakim Pengawas tersebut setiap bulan telah dilakukan laporan monitoring dan evaluasi atas segala kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Akreditasi Penjaminan Mutu dan telah dikeluarkan Surat keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II terkait pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan checklist hal-hal yang harus dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dan dibahas dalam rapat evaluasi bulanan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Tugas-tugas Bantuan baik di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam proses penyelenggaraan administrasi, maka langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil adalah dengan mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI maupun oleh Pengadilan Tinggi Kupang serta Hakim Pengawas Bidang, untuk selanjutnya meningkatkan fungsi pengawasan internal terhadap semua bagian/urusan dalam rangka pembinaan terhadap jajaran Pengadilan Negeri Lembata Kelas II untuk mencapai suatu keberhasilan, sehingga secara perlahan akan membuat organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi.

B. SARAN

Dari struktur organisasi yang ada jelas terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dengan mengisi jabatan-jabatan fungsional dan ditindaklanjuti melalui promosi dan mutasi guna mendukung proses penyelenggaraan administrasi di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga dengan demikian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan sesuai dengan *Standard Operasional Procedure (SOP)* sebagai petunjuk dasar dalam menyelesaikan tugas Yustisia maupun administrasi.

Demikian laporan tahunan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang ada saat ini untuk diketahui serta menjadi pertimbangan dan atas perhatian, diucapkan terima kasih.

Lewoleba, 17 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA


PERELA DE ESPERANZA, S.H.
NIP. 19801130 200312 1 001